

# MANIFESTASI JARING PENGAMAN SOSIAL ATASI MASALAH SOSIAL EKONOMI AKIBAT COVID-19 PADA MASYARAKAT KABUPATEN SLEMAN

Ratna Istriyani<sup>1</sup>, Derry Ahmad Rizal<sup>2</sup>, Moh. Syaiful Bahri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>2</sup> Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>3</sup> Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: <sup>1</sup>ratna.istriyani@uin-suka.ac.id, <sup>2</sup>derry.rizal@uin-suka.ac.id, <sup>3</sup>muhammadbahri404@gmail.com

## Abstrak

*Covid-19 yang muncul awal tahun 2020 membawa Indonesia pada situasi pandemi atau darurat kesehatan. Pasalnya virus tersebut membawa dampak kompleks tidak hanya pada sektor kesehatan melainkan juga sosial dan ekonomi. Physical distancing sebagai langkah darurat untuk mengantisipasi angka penularan justru berdampak pada mandegnya aktivitas sosial ekonomi sehingga berdampak pada produktivitas, tingginya angka pemutusan hubungan kerja, penurunan pendapatan, hingga kesejahteraan. Pada level makro menyumbang kondisi defisit sekaligus kemiskinan. Dampak yang kompleks tersebut sejatinya direspon pemerintah dengan membuat jaring pengaman sosial. Menariknya bahwa upaya pembuatan jaring pengaman juga dilakukan oleh masyarakat akar rumput (grass roots). Penelitian ini berupaya mengkaji mengenai jaring pengaman yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pada masa pandemi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, studi literatur, dan analisis data sekunder dari artikel, portal pemerintah, hingga media online. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jaring pengaman sosial untuk mengatasi krisis pasca pandemi tidak hanya diupayakan oleh pemerintah. Komunitas atau masyarakat akar rumput juga secara inisiatif melakukan gerakan spontanitas membantu kelompok rentan yaitu yang terdampak langsung pandemi. Bantuan yang diberikan adalah dengan menyuplai kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pangan baik siap konsumsi maupun bahan olahan. Program jaring pengaman yang dilakukan masyarakat lebih bersifat spontanitas karena bersifat filantropi, yaitu menghimpun donasi dari masyarakat lalu menyalurkannya dalam bentuk bahan makanan (sembako) maupun makanan siap konsumsi.*

*Kata kunci: Jaring Pengaman Sosial, Covid-19, Pemerintah, Masyarakat Akar Rumput.*

## Abstract

*Covid-19, which emerged in early 2020, brought Indonesia into a health emergency and pandemic. Covid-19 has had a complex impact not only on the health sector but also socially and economically impacts. Physical distancing as an emergency measure to anticipate the number of transmissions actually has an impact on the stagnation of socio-economic activities. So, it has an impact on productivity, high rates of layoffs, decreased income, and welfare. At the macro level, this condition results in a state financial deficit and poverty. The government has responded to this condition by creating a social safety net. However, grassroots communities have also created safety net programs. This study seeks to examine the safety nets carried out by the government and the community during the pandemic. The method used is descriptive qualitative by observing, studying literature, and analyzing secondary data from articles, government portals, to online media. The result of the study is social safety net to overcome the post-pandemic crisis is not only pursued by the government. Grassroots communities also took an initiative to carry out spontaneous movements to help vulnerable groups, namely those directly affected by the pandemic. The supports were in the form of basic needs (food). The safety net program initiated by the community is spontaneous because it is philanthropic by collecting donations from the community. It is converted into food and given to vulnerable groups*

*Keywords: Safety Net, Covid-19, Government, Grassroots Community.*

## 1. PENDAHULUAN

Beberapa waktu belakangan, masyarakat dunia digegerkan dengan pandemi virus korona. Bermula dari penemuan kasus di Kota Wuhan, Hubae China pada akhir tahun 2019; secara cepat virus yang kemudian disebut dengan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjangkiti ribuan manusia. Wuhan terpaksa lumpuh, setelah kebijakan *lockdown* pada 23 Januari 2020, dan *shutdown* beberapa area publik seperti sekolah, universitas, dan tempat-tempat wisata (Rusdiyah, 2020). Dengan cepat wabah virus meluas di lintas negara bahkan benua. Sejumlah kasus penemuan warga terjangkit virus korona di beberapa negara mulai terkuak satu per satu, seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Iran, Italia, Jerman, Perancis, hingga Amerika Serikat; dan Indonesia adalah salah satunya. Tercatat terakhir Covid-19 (26 April 2020) telah mewabah di 213 negara/kawasan dengan kasus terkonfirmasi 2.810.325 dan meninggal dunia 193.825 (Master, 2020). Oleh karena itu WHO (*World Health International*) menyatakan bahwa kasus Covid-19 sebagai darurat global atau *public health emergency of internasional* (Detiknews, 1 Februari 2020).

Sejak dipublikasikan secara terbuka oleh Presiden Joko Widodo terkait penemuan kasus positif Covid-19 pada 2 Maret 2020 di Depok, pemerintah membuat langkah taktis untuk menangani pasien mulai dari protokol kesehatan sesuai standar WHO, hingga penyiapan fasilitas rumah sakit sebagai rujukan. Kurang dari dua minggu berselang, situasi menjadi semakin kompleks ketika presiden menyampaikan himbauan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah, pada 15 Maret 2020. Himbauan itu pun direspon oleh instansi negeri dan swasta di beberapa daerah dengan mengalihkan pekerjaan kantor di rumah, mengalihkan aktivitas pendidikan atau pertemuan tatap muka secara daring. Isolasi diri atau *social distancing* (kemudian diubah dengan istilah *physical distancing*) merupakan satu-satunya upaya antisipatif yang dapat dilakukan untuk meretas penularan virus, mengingat sejauh ini vaksin Covid-19 belum juga ditemukan.

Penerapan isolasi mandiri, bahkan kemudian opsi mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) rupanya memberi efek domino yang rupanya cukup serius. Sektor pariwisata, bisnis formal, maupun informal yang paling terpukul dari kebijakan isolasi mandiri hingga PSBB. Sejumlah sektor usaha pada level makro hingga mikro terpaksa gulung tingkar. Bahkan berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja, Ida Fauziyah mengungkapkan data terbaru Kemnaker per-20 April 2020, jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 total sebanyak 2.084.593 pekerja dari sektor formal dan informal yang berasal dari 116.370 perusahaan. Sebagaimana rinciannya jumlah perusahaan dan pekerja formal yang dirumahkan adalah 1.304.777 dari 43.690 perusahaan. Sedangkan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 241.431 orang pekerja dari 41.236 perusahaan (Rintoko, 2020). Berbagai problem industri dan disrupsi tenaga kerja yang muncul akibat pandemi tidak pelak berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 2.5% yang target awalnya 5,3% (Anonim, 2020).

Pemerintah berupaya keras untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari kasus Covid-19 yang telah menjadi bencana nasional tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat Program Jaring Pengaman. Implementasinya pun beragam, mulai dari memastikan distribusi bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang hilang penghasilan, menaikkan nominal Bantuan Langsung Tunai, hingga mengalokasikan Dana Desa untuk fokus pada penanganan Covid-19 dan Padat Karya Tunai. Namun, apakah itu cukup terlaksana dengan baik? Realitanya program jaring pengaman sosial yang diimplementasikan masih diwarnai inkonsistensi birokrasi dan belum

akuntabel. Hal itu dilihat dari masih banyak aduan yang diterima Ombudsman yang menunjukkan bahwa 89% aduan berkaitan dengan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran (Ombudsman 2020).

Kendati inisiasi jaring pengaman sudah dipikirkan dan coba diimplementasikan pemerintah, rupanya juga banyak inisiasi di level akar rumput yang memberi kepedulian kepada masyarakat yang terdampak wabah. Serangkaian aksi kepedulian, atau gerakan donasi, hingga solidaritas saling membahu turut mewarnai respon penanganan problem sosial ekonomi akibat Covid-19, terutama di Kabupaten Sleman. Gerakan ibu-ibu di wilayah Kecamatan Mlati yang mana *mencantelkan* sayuran di jalan kampung, sayuran tersebut yang siap dimasak dan diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan dan memang perekonomiannya terganggu akibat wabah covid-19 (Agung, 2020). Gerakan ini terinspirasi dari ibu-ibu yang di wilayah Surabaya, Jawa Timur yang melakukan gerakan serupa.

Tidak hanya dari gerakan *mencantelkan* hasil bumi atau pertanian yang dilakukan ibu-ibu namun ada juga dari pihak Pemerintah Daerah Sleman juga dengan sigap mensiasati keramaian yang terjadi di pasar-pasar tradisional yakni dengan program jasa belanja *online*. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Disperindag Sleman Mae Rusmi Suryaningsih menyatakan bahwa saat ini ada 100 toko ritel yang tersebar di 17 kecamatan dan 20 pasar yang bisa melayani belanja secara online (Anon t.t.-d).

Merujuk pada realita tersebut, tulisan ini berupaya menguraikan langkah taktis yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di level akar rumput dalam mengatasi problem sosial ekonomi, terutama di daerah Kabupaten Sleman.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penekannya adalah berupaya mengeksplorasi dan melakukan klarifikasi terhadap suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti (Faisal, 2010: 20). Adapun lokus dari riset ini adalah Kabupaten Sleman. Hal itu mengingat dari 4 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kabupaten Sleman adalah wilayah yang paling tinggi kasus positif Covid-19. Berdasarkan data per 8 Mei 2020 dari akun resmi Pemda Sleman (@kabarsleman), sebanyak 36,6% (52 kasus positif) dari total kasus terkonfirmasi di DIY yaitu 143 kasus (Dinkes DIY 2020). Di sisi lain, Sleman juga menjadi pusat perhatian terutama warganet karena aksi *lockdown* lokal yang dilakukan oleh masyarakat setelah diketahui mulai ditemukannya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebagai langkah inisiatif memutus mata rantai penyebaran virus (Kusuma 2021). Selain itu juga tumbuhnya aksi solidaritas berbagi pangan dalam menghadapi masa pandemi (Sutrisno 2020).

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, yaitu aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis baik yang bersifat partisipatif maupun non partisipatif (Idrus, 2009). Observasi dalam hal ini melihat beberapa kegiatan yang dilakukan warga atau pun pemerintah dalam mengatasi problem sosial maupun ekonomi di masa pandemi. Kemudian analisis data sekunder yaitu akun resmi media sosial Pemkab Sleman, jurnal yang memuat aksi filantropi di masa pandemi, dan media online lainnya, yang berupaya menggali realita implementasi kebijakan tanggap Covid-19 dan jaring pengaman. Peneliti juga mengumpulkan literatur-literatur sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

Pasca pengumpulan data, maka data kemudian dianalisis guna mendapatkan penyajian yang sistematis. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif model interaktif oleh Miles dan Hubberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan simpulan (Idrus, 2009).

## 2. PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Sleman

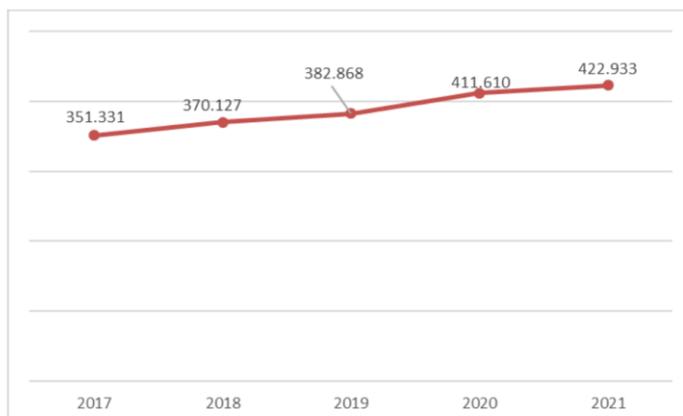
Sleman merupakan salah satu kabupaten di DIY yang wilayahnya cukup strategis. Berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan menjadi jalur masuk lintas provinsi, wilayah Sleman didukung oleh akses jalan dan infrastruktur yang memadai. Kendati berada di bagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman merupakan wilayah yang memiliki akses transportasi yang baik. Artinya seluruh wilayah Sleman bisa dijangkau dengan mudah karena akses jalan yang memadai (Pemda Sleman 2015). Secara administratif, Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa. Sedangkan dari aspek demografi kepadatan penduduk justru terjadi di Kecamatan Depok, disusul dengan Ngaglik, Mlati, dan Gamping yang memang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi (Pemda Sleman 2015).

Berdasarkan aspek ekonomi Sleman banyak didukung oleh sektor Perdagangan, Hotel, Restoran, Jasa, Industri Pengolahan. Namun sektor ini lebih terkonsentrasi di wilayah dekat dengan pusat kota seperti Ngaglik, Depok, dan Gamping (Pemda Sleman 2015). Sedangkan wilayah periferal banyak bergantung pada sektor pertanian, dan hal itu dapat dilihat dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan agraris. Dengan demikian *setting* desa di Sleman masih kental terutama untuk wilayah kecamatan pinggiran atau desa-desa pinggiran dalam kecamatan yang dekat dengan pusat kota. Selain itu kehidupan sosiokultural penduduk Sleman juga masih dipengaruhi oleh sistem nilai keraton dan tradisi Jawa berikut dengan kolektivitasnya. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa Sleman telah mengalami modernisasi seiring dengan pertumbuhan aktivitas urban yang menysasar wilayah-wilayah Sleman yang dekat dengan episentrum kota (Pemda Sleman 2015).

Dalam pemaparannya Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa yang dikutip dalam media massa Republika yakni,

*“...Sosial dan ekonomi merupakan dua bidang yang secara langsung terdampak dengan terganggunya kesehatan, terutama akibat mewabahnya Covid-19. Karenanya, pemulihan kedua bidang menjadi penting. Sebab, ketika kesehatan terpuruk, ekonomi pasti terdampak. Pandemi mengakibatkan beberapa permasalahan pembatasan masyarakat untuk aktivitas sosial dan ekonomi. Salah satu dampak utama batasan tersebut pendapatan masyarakat yang berkurang.”* (Suryana dan Rahadi 2021).

Dari pernyataan tersebut bahwa pandemi sendiri meningkatkan angka kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia (Pramesi 2021), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sleman yang pada tahun 2020 yaitu 8,12 persen (BPS 2021). Gambar di bawah menunjukkan bahwa pada periode Maret 2017 - Maret 2021 terus terjadi peningkatan GK. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, besaran Garis Kemiskinan Kabupaten Sleman adalah Rp 422.933 per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 dimana Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp 411.610 per kapita per bulan, terlihat adanya peningkatan Garis Kemiskinan (GK) sebesar 2,75 persen (Statistik 2021).



Sumber : Susenas Maret 2017 - Maret 2021

Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman tahun 2021)

<https://slemankab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/16/910/profil-kemiskinan-sleman-maret-2021.html>

## 2. Situasi Persebaran Covid-19 di Sleman

Persebaran Covid-19 rupanya cepat menyebar di berbagai wilayah bahkan di belahan negara lainnya pasca kejadian luar biasa di Wuhan, China; salah satunya Indonesia. Data menyebutkan bahwa per 4 Mei 2020, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 3.524.429 orang; dan berikut adalah tabulasi data kasus Covid-19 di beberapa negara dengan predikat luar biasa dengan perbandingan data di Indonesia.

Tabel 1. Tabel Persebaran Covid-19

Negara	Terkonfirmasi	Kasus per 1 juta orang	Sembuh	Meninggal Dunia
Amerika Serikat	1.184.332	3.594	153.246	68.465
Spanyol	218.011	4.629	121.343	25.428
Itali	210.717	3.498	81.654	28.884
Indonesia	11.587	43	1.954	864

Sumber: <https://news.google.com/covid19> diakses pada tanggal 4 Mei 2020

Berdasarkan data di atas Indonesia termasuk dalam kategori serius mengingat rasio kematian mencapai 7,5%. Kasus penularan juga tergolong tinggi. Sejak ditemukan pertama kali pada 2 Maret 2020 dan ditetapkan instruksi untuk *stay at home* atau *#dirumah saja* pada tanggal 16 Maret 2020, kasus infeksi secara drastis mencapai angka belasan ribu. Bahkan menginjak bulan kedua status tanggap Covid-19 ini, beberapa wilayah tengah berada pada puncak krisis tanpa kecuali Sleman.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Humas Provinsi DIY melalui akun Instagram resmi (@humasjogja), per 20 Mei 2020 akumulasi positif korona mencapai 209 kasus. Adapun kasus positif di Sleman per 20 Mei 2020 mencapai 79, atau 37,79% kasus positif berada di Sleman. Jumlah kasus positif terbanyak berada di Kecamatan Depok dan Ngaglik yang merupakan wilayah terpadat dan paling tinggi aktivitas dan mobilitasnya.

Tabel 2. Kasus Positif Covid-19

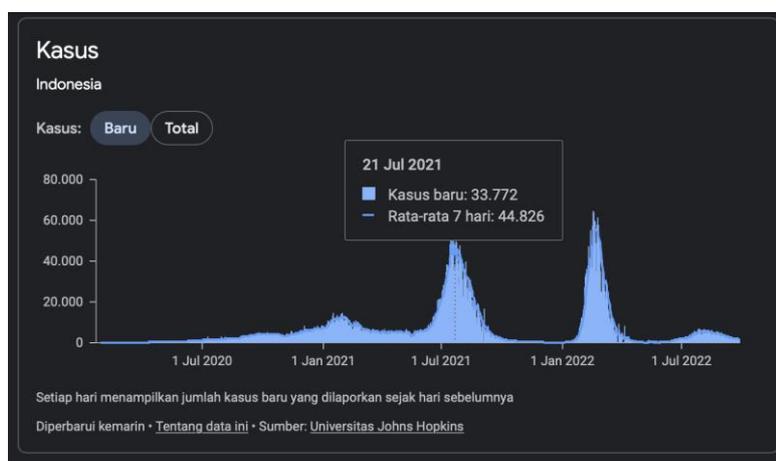
Status	Keterangan	Kota/Kabupaten					
		Yogyakarta	Sleman	Kulon Progo	Gunung Kidul	Bantul	Non-DIY
ODP	Proses	615	1.318	1.212	992	760	
PDP	Meninggal	1	4		1	1	
	Negatif	89	288	45	65	169	43
	Proses	8	49	4	13	25	5

Positif	Dirawat	6	17	4	9	17	
	Meninggal	1	4			2	
	Sembuh	6	27	1	5	11	

Data diperoleh dari <https://corona.jogjaprov.go.id/> diakses 4 Mei 2020 (perbarui dengan data per 20 Mei 2020).

Tingginya jumlah orang yang positif terkena virus dan tipe penularan transmisi lokal mendorong respon beragam oleh masyarakat. Awal ditemukannya kasus di Sleman membuat beberapa wilayah desa di Sleman melakukan karantina wilayahnya mandiri dengan membatasi akses masuk ke desa dengan menuliskan keterangan *lockdown* dan sejenisnya. Tentu kata *lockdown* dalam hal ini bukan dalam arti kebijakan politik namun sebatas respon lokal dalam rangka menekan penularan virus di wilayah desa. Undang-undang No. 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan menyebutkan terdapat empat macam karantina, yakni karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar. Pada pasal 53 dijelaskan bahawasanya respon kedaruratan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila sudah terjadi penyebaran penyakit atau wabah di dalam wilayah tersebut. Artinya jika ada salah satu orang di wilayah tersebut terkena wabah selain dengan melakukan karantina dirumah juga wilayah tersebut mendukung dan melakukan karantina wilayah agar tidak menyebar secara luas.

Pada pertengahan tahun 2021, terjadi serangan gelombang kedua virus korona dengan varian delta di seluruh Indonesia, tanpa kecuali Kabupaten. Varian delta memang dianggap lebih mengkhawatirkan karena dampak fatalistik terhadap angka kematian, Sleman menjadi kabupaten yang tinggi untuk angka kematiannya (detik.com, 30 Juli 2021). Status darurat kembali ditetapkan. Namun istilah yang digunakan bukan lagi karantina wilayah, *shutdown*, *lockdown*; maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPKM), melainkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan kategori level 1-4. Tujuan dari PPKM adalah untuk menekan mobilitas yang bisa berdampak signifikan pada penurunan angka penularan (Slemankab, 2021). PPKM pun beberapa diperpanjang karena indikasi belum menurunnya level yang dipengaruhi oleh masih tingginya kasus penularan (Harian Jogja, 2021).



Gambar 2. Kasus Covid-19 di Indonesia

Sumber:

<https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=%2Fm%2F03ryn&state=7&gl=ID&ceid=ID%3Aid>

### 3. Jaring Pengaman Sosial

Jaring Pengaman Sosial ini bagi setiap masyarakat terdengar asing, namun program ini telah diimplementasikan sejak tahun 1998 guna mengatasi dampak krisis moneter tahun 1997 (Ombudsman 2020). Sesuai dengan latar historis Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) merupakan kebijakan yang bersifat menyelamatkan (*rescue*) dan memulihkan (*recovery*) masyarakat dari dampak krisis sosial ekonomi (Pancaningdyah 2015). Kebijakan Jaring Pengaman Sosial kembali diadaptasi pemerintahan Joko Widodo periode kedua dalam merespon dampak krisis akibat Pandemi Covid-19 (Hajad, Ikhsan, dan Marefanda 2021:126–27). Adapun ragam dalam jaring pengaman sosial yang diutarakan oleh Presiden Joko Widodo yakni berupa : 1) Penambahan penerima dan besaran manfaat Program Keluarga Harapan atau PKH serta kartu sembako, 2) Kartu Pra Kerja, 3) Subsidi biaya listrik, 4) Operasi pasar dan logistik, dan yang terakhir 5) Pembayaran kredit bagi kelompok informal (Ahmada, Marsetyo, dan Putri 2020a:517–18). Dalam keberlanjutan program tersebut, serta adanya pandemi yang melanda seluruh dunia secara tegas Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 dalam pidatonya merancang ulang kembali program tersebut. Perubahan tersebut guna mengantisipasi keterlambatan ekonomi di masa Covid-19, yang meliputi penambahan anggaran untuk program PKH, Kartu Sembako, Program Kartu Prakerja, dan subsidi listrik akan dinaikkan dan besaran jumlah penerima manfaat dari jaring pengaman sosial (Keuangan Republik Indonesia 2021). Dalam anggaran untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp. 405,1 Triliun, Rp. 110 Triliun-nya dialokasikan untuk jaring pengaman sosial (Modjo 2020:112).

Program Jaring Pengaman Sosial pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 38/PMK.02/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid -19 (Keuangan Republik Indonesia 2021). Program Jaring Pengaman Sosial selama pandemi Covid adalah program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19 dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi normal atau normal baru (Nasrah dkk. 2021:125).

Penelitian dari oleh Hidayati Nasrah, dkk. (2021) menilik mengenai implementasi program jaring pengaman sosial pada masa pandemi Covid-19 di Pekanbaru. Dalam penerapannya tidak serta merta seluruh masyarakat menerima jaring pengaman sosial ini, tentu memiliki beberapa persyaratan sebagai penerima (Nasrah dkk. 2021:128–31). Dampak dari beberapa program jaring pengaman sosial ini secara umum menguatkan struktur ekonomi yang ada di masyarakat (Widiastuti dkk. 2021:338).

Selaras dengan pengimplementasi dalam program jaring pengaman sosial, di wilayah Kabupaten Sleman. Pemerintah tidak bisa melaksanakan program itu secara sepihak namun diperlukannya peran aktif masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Organisasi Masyarakat lainnya. Hal ini bertujuan agar bantuan tersebut tepat sasaran dengan data yang diperoleh dengan melalui pengecekan secara langsung (Suryana dan Rahadi 2021). Berdasarkan data yang ditemukan respon terhadap dampak pandemi di Kabupaten Sleman memang menunjukkan realitas yang cukup menarik. Kendati Jaring Pengaman Sosial lebih lekat sebagai strategi yang digunakan pemerintah dalam menyelamatkan dan memulihkan krisis, realitanya masyarakat akar rumput turut memiliki kesadaran untuk menginisiasi upaya serupa. Berdasarkan hal ini penulis menguraikan bentuk Jaring Pengaman Sosial yang dilakukan oleh pemerintah lokal dan masyarakat akar rumput, dalam rangka sekaligus menarasikan distingsi tipologi dari keduanya.

a. Bentuk Jaring Pengaman Sosial Pemerintah

1) Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai merupakan langkah taktis pertama yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi krisis di awal pandemi. Dana bantuan bersumber dari Dana Desa yang dialokasikan khusus untuk penanganan Covid-19. Distribusi dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan komando dan pengawasan pemerintah kabupaten (merujuk pada Surat Edaran Bupati, dan pertama kali dilaksanakan berdasarkan SE Bupati Sleman No. 140/01043 tanggal 21 April 2020) serta Lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pranyoto dkk. 2020).

Sasaran dari BLT adalah keluarga miskin non penerima Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), dan sejenisnya. Adapun pendataan penerima BLT dilakukan oleh Relawan Gugus Tugas Covid-19 dengan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS), Data Warga Miskin berdasar SK Bupati, warga miskin kehilangan pekerjaan yang belum terdaftar sebagai penerima, warga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis, hingga warga miskin terdampak ekonomi karena kehilangan pekerjaan. Kendati demikian, data tersebut kemudian harus diputuskan berdasarkan pada musyawarah desa (Pranyoto dkk. 2020).

2) Donasi Uang dan Barang untuk Penanggulangan Covid-19

Pada awal pandemi, Pemerintah Kabupaten Sleman membuka wadah donasi bagi masyarakat Sleman pada khususnya untuk berpartisipasi mengurangi krisis dan dampak pandemi di Kabupaten Sleman. Donasi yang dimaksudkan dapat berupa uang maupun barang. Pengumpulan donasi uang wajib melalui rekening Pemerintah Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kemudian dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan sistem terpisah dari dana APBD. Adapun bantuan berupa barang disalurkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki ketugasan terkait penanganan bencana baik tingkat kabupaten maupun kewilayahan yaitu BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD Sleman dan Prambanan, serta Kecamatan. Donasi dalam bentuk barang dibedakan dalam 2 kategori yaitu medis dan non medis. Adapun barang non medis meliputi bahan kebutuhan pokok pangan dan cuci (@kabarsleman,2020).

b. Bentuk Jaring Pengaman Sosial Masyarakat (*Grass Roots*):

1) Inisiasi Berbagi Bahan Makanan

Kepedulian untuk berbagi memang merupakan aspek sosial manusia sebagai makhluk sosial. Terutama masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki komunalitas tinggi. Hal itu didukung oleh survei *World Giving Index* tahun 2021 yang menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dalam perilaku berdonasi. Pandemi adalah momentum paling kentara di mana banyak orang saling membantu sama lain kepada kelompok terdampak krisis akibat Covid-19. Salah satunya adalah yang terjadi oleh Ibu di Rajek Lor Tirtoadi Mlati Sleman yang kemudian diikuti oleh warga lainnya. Beberapa kebutuhan pokok seperti beras, telur, hingga sayuran hasil kebun dibungkus dan dicantelkan di dekat rumahnya setiap. Tujuannya adalah untuk membantu warga non penerima bantuan dari pemerintah namun kehilangan sumber penghasilan. Kebutuhan yang di-*catel*-kan (ditaruh) tersebut kemudian dia unggah di WA agar warga yang membutuhkan tahu, mengingat pada masa pandemi warga diminta

bertahan di dalam rumah. Hal yang dilakukan tersebut rupanya memiliki efek domino, yaitu menarik warga lain sekitar dan rekan-rekan lain untuk turut berdonasi kebutuhan bahan pokok (agung 2020).

## 2) Gerakan Solidaritas Pangan Jogja (SPJ)

Solidaritas Pangan Jogja merupakan gerakan yang lahir sebagai respon atas permasalahan yang muncul pada masa pandemi. Gerakan yang diinisiasi oleh para aktivis Jogja ini, bertujuan untuk membantu pada kelompok rentan yaitu mereka yang bekerja di sektor informal dan terdampak langsung pandemi. Adapun bantuan yang diberikan kepada mereka adalah nasi bungkus (makanan). Setidaknya ada dua alasan kenapa memilih distribusi bantuan berupa nasi bungkus. *Pertama*, makanan adalah kebutuhan pokok yang sifatnya tidak dapat ditunda. Terlebih pada pandemi, masyarakat dihadapkan pada kesulitan ekonomi hanya sekedar untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan pokok. Alasan *kedua*, distribusi makanan merupakan langkah membuat jaring pengaman yang paling realistis dan responsif pada saat pandemi. Daerah operasi atau kegiatan Solidaritas Pangan Jogja adalah Kota Jogja, Sleman, dan Bantul. Lalu pembagian tugas meliputi 3 peran yaitu Penanggung Jawab Dapur, Administrasi, dan Relawan (Ahmada, Marsetyo, dan Putri 2020b).

Adapun mekanisme kerja yang dilakukan oleh Solidaritas Pangan Jogja meliputi empat proses. *Pertama*, yaitu penggalangan dana yang dilakukan melalui Instagram @solidaritas.yogyakarta (Ahmada dkk. 2020b). Aksi penggalangan dana memang masif di masa awal pandemi hingga tahun kedua. Hal itu mengingat bahwa masyarakat Indonesia memang terbukti memiliki perilaku kedermawanan sosial yang tinggi. Hal itu didasarkan berdasarkan riset yang dilakukan oleh CAF World Giving Index pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi pertama dengan persentase rata-rata 69% dari 3 variabel pengukuran yaitu sikap kesukarelawanan, donasi, hingga membantu orang yang tidak dikenal. Variable donasi adalah yang paling tinggi yaitu 83% ( World Giving Index, 2021). *Kedua*, distribusi donasi ke tiap-tiap dapur. Dalam hal ini Solidaritas Pangan Jogja memang mendirikan dapur umum dan dapur komunitas yang tersebar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. *Ketiga* pembuatan makan di dapur umum dan komunitas. *Keempat* adalah pendistribusian makanan kepada kelompok sasaran (Ahmada dkk. 2020b).

## 4. Refleksi Program Jaring Pengaman Sosial

Jaring Pengaman Sosial adalah strategi darurat yang paling memungkinkan dilakukan untuk mengatasi krisis sosial dan ekonomi pada masa pandemi. Hal itu karena krisis yang terjadi adalah dampak yang belum bisa terantisipasi sebelumnya. Artinya pandemi adalah bencana kesehatan yang dampaknya tidak bisa diprediksikan secara singkat dan pasti. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi jangka pendek adalah hal yang paling utama dilakukan. Jaring Pengaman Sosial yang dilakukan pemerintah atau inisiasi masyarakat itu sendiri memang menjadi jalan keluar yang mampu membantu kelompok rentan yang terkena imbas kebijakan *physical distancing* dan pembatasan sosial baik skala kecil maupun besar. Namun dapat diakui bahwa Jaring Pengaman Sosial memang perlu menjadi bahan refleksi. Jaring Pengaman Sosial yang dilakukan pemerintah dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos) masih banyak yang belum tepat sasaran, mengingat akurasi data penerima bantuan sosial masih meragukan. Sebab tidak dipungkiri terjadi tumpang tindih antara data penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pusat dan provinsi. Terlepas dari problem itupun, Jaring

Pengaman Sosial yang dilakukan pemerintah lebih sebatas sebagai pengaman sementara, belum sampai pada *recovery* sebab dampak dari krisis pandemi cukup kompleks dan berdampak jangka panjang.

Jaring Pengaman Sosial yang diinisiasi masyarakat atas landasan solidaritas berupa penghimpunan donasi dan distribusi kebutuhan masyarakat juga sangat bergantung pada donasi yang terkumpul. Oleh karena itu, program tersebut ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang bisa fluktuatif. Bahkan keberlanjutan dari program tersebut juga belum bisa diprediksikan mengingat terbentuk secara insidental dan cenderung bersifat *ad hoc*. Sama seperti yang terjadi pada program yang dilakukan pemerintah, upaya yang dilakukan oleh komunitas relawan juga lebih bersifat pengaman sementara, belum bisa menjadi sumber penyembuhan (*recovery*) terhadap dampak utama dari pandemi Covid-19 yaitu terkait vakumnya sumber pendapatan sehingga berpengaruh kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

### **3. KESIMPULAN**

Jaring pengaman sosial adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis akibat Pandemi Covid-19. Jaring Pengaman Sosial rupanya tidak hanya diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, namun juga diinisiasi masyarakat (*grass roots*). Sedikit banyak, Jaring Pengaman Sosial tersebut memang membantu pada situasi darurat yaitu dengan menghimpun dan mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat. Namun, distribusi kebutuhan pokok belum bisa menjadi jalan keluar utama dari krisis ekonomi serta sosial akibat pandemi. Itu hanya bisa menjadi pengaman sementara, sebab dampak pandemi rupanya lebih kompleks dan menentukan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, selain jaring pengaman perlu upaya strategis lainnya berjangka menengah dan panjang untuk mengatasi krisis kompleks dari pandemi.

### **4. REFERENSI**

- Agung. 2020. "Ibu di Sleman Ini Cantelkan Bahan Makanan untuk yang Membutuhkan." *KRJogja*. Diambil 20 Mei 2020 (<https://www.krjogja.com/kisah-inspiratif/sosok/ibu-di-sleman-ini-cantelkan-bahan-makanan-untuk-yang-membutuhkan/>).
- Ahmada, Saqib Fardan, Fernandito Dikky Marsetyo, dan Rizqy Anita Putri. 2020a. "Solidaritas Pangan Jogja Sebagai Aktor Alternatif Penyedia Kesejahteraan Di Masa Krisis Pandemi COVID-19." *Journal of Social Development Studies* 1(2):1–13. doi: 10.22146/jsds.524.
- Ahmada, Saqib Fardan, Fernandito Dikky Marsetyo, dan Rizqy Anita Putri. 2020b. "Solidaritas Pangan Jogja Sebagai Aktor Alternatif Penyedia Kesejahteraan Di Masa Krisis Pandemi COVID-19." *Journal of Social Development Studies* 1(2):1–13. doi: 10.22146/jsds.524.
- Anon. 2020. "Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi akan Turun Cukup Tajam akibat Corona - Katadata.co.id." Diambil 20 Mei 2020 (<https://katadata.co.id/berita/2020/04/14/jokowi-pertumbuhan-ekonomi-akan-turun-cukup-tajam-akibat-corona>).
- Anon. t.t.-a. "Apa yang Terjadi Setelah WHO Nyatakan Virus Corona Sebagai Darurat Global?" Diambil 27 April 2020 (<https://news.detik.com/abc-australia/d-4881448/apa-yang-terjadi-setelah-who-nyatakan-virus-corona-sebagai-darurat-global>).
- Anon. t.t.-b. "Kematian Corona Tinggi, Ternyata Ada 10 Kasus Varian Delta di Sleman." Diambil 31 Agustus 2022 (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5662956/kematian-corona-tinggi-ternyata-ada-10-kasus-varian-delta-di-sleman>).

- Anon. t.t.-c. "Pemerintah Kabupaten Sleman » Blog Archive » PPKM Darurat Berhasil Tekan Mobilitas Warga." Diambil 31 Agustus 2022 (<http://www.slemankab.go.id/18487/ppkm-darurat-berhasil-tekan-mobilitas-warga.slm>).
- Anon. t.t.-d. "Pekab Sleman Sediakan Toko Ritel." *Tribun Jogja*. Diambil 20 Mei 2020 (<https://jogja.tribunnews.com/2020/04/27/pekab-sleman-sediakan-toko-ritel>).
- Anon. t.t.-e. "World Giving Index 2021| CAF." Diambil 31 Agustus 2022 (<https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>).
- BPS, Badan Pusat Statistik. 2021. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman." Diambil 3 September 2022 (<https://slemankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/e74ccf8786582e2499f163dc/kabupaten-sleman-dalam-angka-2021.html>).
- Dinkes DIY. 2020. "Update Data Covid-19 di DIY Per 8 Mei 2020 Pukul 16.00 WIB." Diambil 28 September 2022 (<https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/update-data-covid-19-di-diy-per-8-mei-2020-pukul-16-00-wib-2>).
- Hajad, Vellayati, Ikhsan Ikhsan, dan Nodi Marefanda. 2021. "Jaring Pengaman Sosial: Analisis Anggaran Penanganan COVID-19 Di Aceh." *Journal of Governance and Social Policy* 2(2):126–39. doi: 10.24815/gaspol.v2i2.23688.
- @kabarsleman. 2020. "Donasi Uang dan Barang Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19." Keuangan Republik Indonesia, Kementerian. 2021. *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kusuma, Wijaya. 2021. "12 Warga Positif Covid-19, Satu Dusun di Sleman Terapkan 'Lockdown.'" *KOMPAS.com*. Diambil 28 September 2022 (<https://regional.kompas.com/read/2021/05/27/155000478/12-warga-positif-covid-19-satu-dusun-di-sleman-terapkan-lockdown->).
- Master, Web. t.t. "Beranda." *Covid19.go.id*. Diambil 27 April 2020 (<https://www.covid19.go.id/>).
- Media, Harian Jogja Digital. t.t. "PPKM Level 4 Diperpanjang: Pemkab Sleman Bikin Aturan Baru, Ini Detailnya." *Harianjogja.Com*. Diambil 31 Agustus 2022 (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/07/26/512/1078262/ppkm-level-4-diperpanjang-pekab-sleman-bikin-aturan-baru-ini-detailnya>).
- Modjo, M. Ikhsan. 2020. "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4(2):103–16. doi: 10.36574/jpp.v4i2.117.
- Nasrah, Hidayati, Irdyanti Irdyanti, Yessi Nesneri, dan Fitri Hidayati. 2021. "Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pekanbaru." *Jurnal EL-RIYASAH* 11(2):119–38. doi: 10.24014/jel.v11i2.11699.
- Ombudsman, Ombudsman. 2020. "Jaring Pengaman Sosial Selama Pandemi Covid-19 Dalam Konteks Sosio-Politik Di Indonesia." Diambil 28 September 2022 (<https://ombudsman.go.id:443/artikel/r/artikel--jaring-pengaman-sosial-selama-pandemi-covid-19-dalam-konteks-sosio-politik-di-indonesia>).
- Pancaningdyah, Esti. 2015. "Analisis Biaya Manfaat Program Jaring Pengaman Sosial Di Kabupaten Labuhan Batu." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 4(1):53–80. doi: 10.22146/jkap.8459.
- Pemda Sleman. 2015. "REVIEW RPI2-JM BIDANG CIPTA KARYA 2015-2019 (RENCANA TERPADU & PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH) KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA."
- Pramesi, Rahajeng. 2021. "Pulihkan Sosial dan Ekonomi Fokus Pemkab Sleman Pascapandemi." *Pulihkan Sosial dan Ekonomi Fokus Pemkab Sleman Pascapandemi - Ayo Yogya*. Diambil 3

- September 2022 (<https://yogya.ayoindonesia.com/ngayogyakarta/pr-391845001/pulihkan-sosial-dan-ekonomi-fokus-pemkab-sleman-pascapandemi>).
- Pranyoto, Victorianus Sat, Terkini, Top News, Terpopuler, Nusantara, Nasional, Jogja Terkini, Politik, Peristiwa, Ekonomi, Olahraga, Pendidikan, Pariwisata, Hiburan, Foto, Video, Ketentuan Penggunaan, Tentang Kami, Pedoman Media Siber, dan Kebijakan Privasi. 2020. "Pemkab Sleman bagikan BLT Dana Desa untuk penanganan COVID-19." *Antara News Yogyakarta*. Diambil 11 September 2022 (<https://jogja.antaranews.com/berita/426468/pemkab-sleman-bagikan-blt-dana-desa-untuk-penanganan-covid-19>).
- Rintoko. t.t. "Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja Yang Ter-PHK Nanti : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI." Diambil 20 Mei 2020 (<https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti>).
- Rusdiyah, Hilyatu Millati. t.t. "Cerita dan Pelajaran dari 'Lockdown' Wuhan." *detiknews*. Diambil 27 April 2020 (<https://news.detik.com/kolom/d-4953943/cerita-dan-pelajaran-dari-lockdown-wuhan>).
- Statistik, Badan Pusat. 2021. "Profil Kemiskinan Sleman Maret 2021."
- Suryana, Wahyu, dan Fernan Rahadi. 2021. "Tahun Depan, Sleman Masih Kejar Pemulihan Sosial Ekonomi." *Republika Online*. Diambil 3 September 2022 (<https://republika.co.id/share/r30rt2291>).
- Sutrisno, Eri. 2020. "Indonesia.go.id - Solidaritas Pangan, Gotong Royong Berbagi di Tengah Pandemi." Diambil 28 September 2022 (<https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/2037/solidaritas-pangan-gotong-royong-berbagi-di-tengah-pandemi?lang=1>).
- Widiastuti, Tika, Puji Sucia Sukmaningrum, Muryani Muryani, dan Aufar Fadlul Hady. 2021. "Pendampingan Program Jaring Pengaman Sosial: Studi Dampak Sosio Ekonomi Covid-19 Berdasarkan Maqashid Syariah Di Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 5(2):338–45. doi: 10.20473/jlm.v5i2.2021.338-345.